

EFEKTIVITAS AKSI KONVERGENSI DALAM PROGRAM PENGENDALIAN STUNTING DI KECAMATAN LIMBOTO BARAT, KABUPATEN GORONTALO

**Ikram Andi Taufan Hurudji¹, Udin Hamim², Lisda Van Gobel³, Ellys Rachman⁴,
Sumanti Maku⁵**

^{1,3,4,5} Universitas Bina Taruna Gorontalo, Provinsi Gorontalo

²Universitas Negeri Gorontalo, Provinsi Gorontalo

ikramandi@gmail.com

Received: 28-09- 2025	Revised: 28-10-2025	Approved: 25-11-2025
-----------------------	---------------------	----------------------

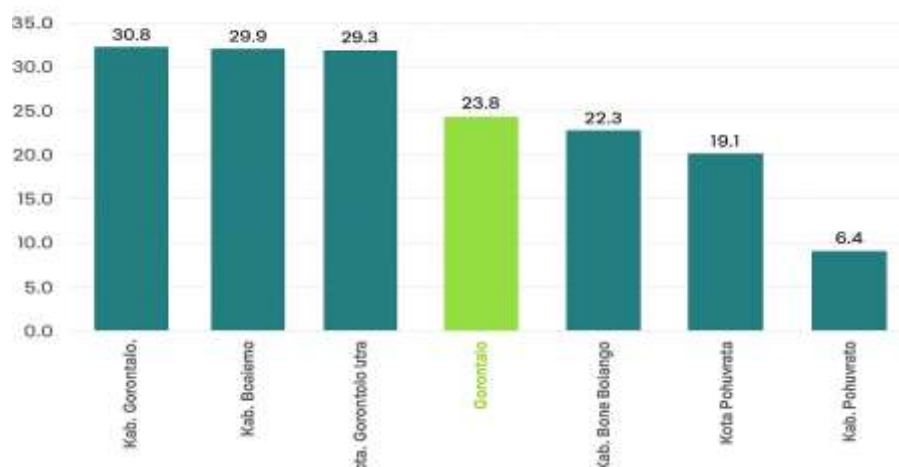
ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas aksi konvergensi dalam program pengendalian stunting di Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus, melalui teknik observasi partisipatif, wawancara mendalam terhadap 15 informan kunci, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan aksi konvergensi telah memberikan dampak positif dalam penurunan stunting, ditunjukkan melalui peningkatan integrasi program dalam dokumen perencanaan desa serta keterlibatan lintas sektor. Namun demikian, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya kapasitas teknis kader, keterbatasan sarana pendukung, serta lemahnya koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas aksi konvergensi berada pada kategori cukup, namun diperlukan penguatan kapasitas SDM, penyederhanaan birokrasi, serta optimalisasi forum koordinasi agar upaya pengendalian stunting lebih terarah dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Aksi Konvergensi, Stunting, Efektivitas, Kesehatan Masyarakat, Program Terpadu

DAFTAR PUSTAKA

Stunting merupakan salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian global karena dampaknya yang luas terhadap kualitas hidup manusia. Di Indonesia, stunting tidak hanya memengaruhi pertumbuhan fisik anak, tetapi juga perkembangan kognitif, tingkat pendidikan, dan produktivitas masa depan, yang pada akhirnya berimplikasi terhadap kualitas sumber daya manusia bangsa (Maesarah et al., 2021; Husen et al., 2022). Menyadari besarnya ancaman ini, pemerintah Indonesia telah menargetkan penurunan angka stunting hingga mencapai 14% pada tahun 2024 melalui strategi nasional berbasis aksi konvergensi lintas sektor (Bappenas, 2018).



Gambar 1. Garfik Prevelensi Stunting Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo

Berdasarkan grafik prevalensi stunting antar kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo, terlihat bahwa masih terdapat beberapa kabupaten yang menjadi lokus stunting sejak tahun 2019 dengan angka prevalensi di atas 20%, yaitu Kabupaten Gorontalo, Boalemo, Gorontalo Utara, dan Bone Bolango. Sementara itu, Kota Gorontalo menunjukkan angka prevalensi di bawah 20%, dan Kabupaten Pohuwato berada di bawah target nasional untuk tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Gorontalo perlu bekerja lebih keras untuk mencapai target nasional yang telah ditetapkan. Efektivitas peran Pemerintah Provinsi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat menjadi sangat krusial dalam menurunkan prevalensi stunting di daerah ini (Nurdin et al., 2019). Kabupaten Gorontalo termasuk daerah dengan prevalensi stunting yang tinggi, khususnya Kecamatan Limboto Barat yang berada dalam zona merah dengan prevalensi di atas ambang batas WHO. Pemerintah daerah telah merespons kondisi ini dengan mengimplementasikan intervensi gizi spesifik dan sensitif yang terintegrasi melalui aksi konvergensi. Strategi ini bertujuan untuk menggabungkan seluruh program dari berbagai sektor agar upaya penurunan angka stunting menjadi lebih efektif dan menyeluruh (Maesarah et al., 2021). Namun demikian, implementasi aksi konvergensi di tingkat kecamatan masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta perencanaan dan penganggaran yang belum tepat sasaran. Banyak desa yang belum mampu mengintegrasikan aksi konvergensi ke dalam perencanaan pembangunan desa secara menyeluruh. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan masih rendah, sehingga memperburuk kondisi stunting di daerah tersebut.

Dalam upaya pengendalian stunting, kecamatan memainkan peran penting sebagai pusat koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan melalui aksi konvergensi sebagai strategi dalam pengendalian stunting, termasuk pemerintah desa, puskesmas, kader posyandu, serta sektor swasta dan masyarakat. Aksi konvergensi dalam konteks ini sebagai strategi yang mengacu pada integrasi berbagai program dan sumber daya guna mempercepat penurunan angka stunting secara lebih efektif. Berikut adalah data stunting Kecamatan Limboto Barat:

Tabel 1.
Data Stunting 2024

DESA	BULAN / UMUR																							
	JANUARI		FEBRUARI		MARET		APRIL		MEI		JUNI		JULI		AGUSTUS		SEPTEMBER		OKTOBER		NOVEMBER		DESEMBER	
	0-23	24-59	0-23	24-59	0-23	24-59	0-23	24-59	0-23	24-59	0-23	24-59	0-23	24-59	0-23	24-59	0-23	24-59	0-23	24-59	0-23	24-59	0-23	24-59
HAYA-HAYA	2	4	2	4	1	5	1	1	1	1	1	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	3
PADENGO	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1
YOSONEGORO	4	2	5	2	6	1	4	1	5	2	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	3	2
OMBULO	5	7	5	7	5	8	3	8	3	8	3	8	3	8	3	9	2	9	2	9	2	7	2	8
DAENAA	3	22	2	22	2	21	1	18	1	19	1	18	1	18	1	19	0	19	0	19	0	19	0	19
HUTABOHU	0	3	2	4	0	4	0	4	0	4	2	4	2	4	2	4	2	4	5	5	4	5	3	6
TUNGGULO	5	15	5	17	6	19	2	18	2	16	2	16	2	16	2	16	1	16	1	16	0	14	0	17
PONE	0	6	0	6	0	5	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	5	0	5
HUIDU	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	1	2	1
HUIDU UTARA	4	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4	2	3	2	3	2	3	3	3	4	2
TOTAL	24	63	25	67	25	68	16	60	17	61	19	64	17	65	16	66	14	66	18	67	15	63	15	64

Pendekatan aksi konvergensi dalam pengendalian stunting merupakan strategi nasional yang menekankan pentingnya integrasi lintas sektor, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga ke desa. Strategi ini bertujuan untuk mempercepat

penurunan angka stunting dengan memadukan intervensi gizi spesifik dan sensitif melalui sinergi antar pemangku kepentingan. Pemerintah kecamatan dalam hal ini memiliki peran strategis sebagai fasilitator utama dalam menyelaraskan kebijakan nasional dengan implementasi di tingkat desa dan kelurahan, sehingga program berjalan secara terpadu, terukur, dan tepat sasaran (Maesarah et al., 2021). Pemerintah melalui Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 telah menetapkan lima pilar utama percepatan penurunan stunting, yaitu komitmen kepemimpinan, komunikasi perubahan perilaku, konvergensi program, ketahanan pangan dan gizi, serta pemantauan dan evaluasi berbasis data. Pilar ketiga menjadi fondasi penting dalam memastikan seluruh program terintegrasi dari tingkat nasional hingga desa, dan mendorong pemanfaatan dana desa untuk intervensi gizi (Ningsih et al., 2024).

Upaya pencegahan stunting melalui aksi konvergensi dapat memaksimalkan intervensi yang telah digalakkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam rangka ikut memantau asupan gizi, kemudahan mengakses layanan serta terbangunnya tanggungjawab_bersama atas kondisi stunting yang ada didesa Untuk mengatasi stunting pemerintah nasional menetapkan 5 (lima) pilar yaitu pilar 1 komitmen dan visi kepemimpinan, pilar 2 kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku, pilar 3 konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program antar level baik pusat dan daerah, pilar 4 ketahanan pangan dan gizi serta pilar 5 yaitu pemantauan dan evaluasi. Pada pilar 3 menekankan aksi yang terintegrasi yang harus dilakukan oleh pemerintah baik tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota sampai dengan di tingkat desa dalam upaya penerapan kebijakan intervensi gizi spesifik dan sensitif (Ningsih et al., 2024).

Konvergensi adalah kegiatan terpadu yang saling berhubungan antar program dan kegiatan baik yang kegiatan fisik maupun pemberdayaan masyarakat. Sinergitas menjadi keharusan antara berbagai level baik pusat dan daerah sehingga diperlukan kebijakan strategis dan program yang bersifat afirmatif atau menguatkan sebagai upaya dalam percepatan penanganan stunting. Rendahnya kualitas kerjasama serta pengintegrasian oleh pemerintahan terletak pada sisi implementasinya, sedangkan untuk model kebijakan sudah cukup memadai. (Penurunan et al., 2025). Dalam pelaksanaannya, pemerintah kecamatan berperan sebagai fasilitator dalam mengkoordinasikan lintas sektor dan menyelaraskan kebijakan pusat dengan realitas di tingkat desa. Penelitian Penurunan et al. (2025) menegaskan bahwa kendala utama bukan pada model kebijakan, melainkan pada aspek implementasi yang lemah, seperti koordinasi yang tidak optimal dan rendahnya kapasitas SDM di tingkat lokal.

Pendekatan aksi konvergensi dalam pengendalian stunting adalah strategi pemerintah yang mengintegrasikan berbagai program dan sumber daya lintas sektor untuk menurunkan angka stunting secara efektif. Pemerintah kecamatan berperan sebagai fasilitator utama dalam menyelaraskan kebijakan nasional dengan implementasi di tingkat desa/kelurahan agar program-program terkait berjalan secara terpadu dan tepat sasaran. (Maesarah et al., 2021). Keberhasilan aksi konvergensi sangat dipengaruhi oleh peran kepemimpinan lokal yang visioner. Arifin et al. (2023) menemukan bahwa peran aktif kepala desa dan camat dalam menggerakkan kader serta masyarakat sangat menentukan keberhasilan program. Di sisi lain, keterlibatan masyarakat menjadi kunci dalam memastikan praktik gizi yang benar di tingkat rumah tangga. Oleh karena itu, komunikasi perubahan perilaku menjadi hal yang vital dalam strategi ini.

METODE PENELITIAN



Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memungkinkan peneliti menggali secara mendalam proses implementasi aksi konvergensi dalam pengendalian stunting serta memahami dinamika sosial, kelembagaan, dan tantangan di tingkat lokal. Desain studi kasus dipilih karena fokus penelitian diarahkan pada satu wilayah spesifik, yakni Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, yang merupakan salah satu daerah dengan angka prevalensi stunting tinggi dan menjadi lokus intervensi pemerintah daerah. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam pelaksanaan program pengendalian stunting yang berbasis aksi konvergensi lintas sektor di tingkat kecamatan dan desa. Penelitian ini tidak bermaksud menggeneralisasi temuan ke seluruh wilayah, tetapi untuk memahami fenomena secara kontekstual dan kompleks pada unit analisis yang dipilih.

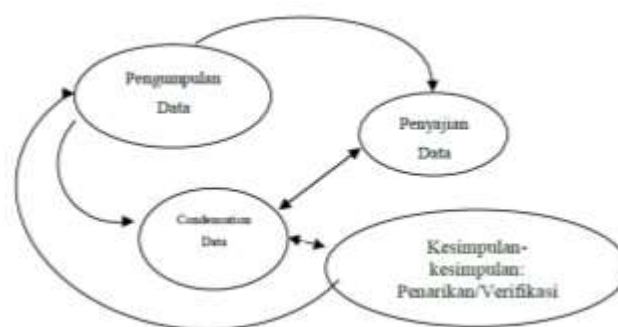
Tabel 2.
Jumlah Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah (orang)
1	Sekretaris Kecamatan	1
2	Kepala Seksi	1
3	Kepala Puskesmas	2
4	Korwil KB Kec Limboto Barat	1
5	Petugas Gizi PKM Limboto Barat	1
6	Pendamping PKH	1
7	Pendamping Desa	1

8	Kepala Desa	2
9	Tim Penggerak PKK Kecamatan Limboto Barat	1
10	Perwakilan Kader Kesehatan	2
11	Masyarakat penyintas stunting	2
Jumlah		15

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung dengan menghadiri berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan aksi konvergensi, seperti kegiatan Posyandu, rembuk stunting tingkat desa, musyawarah desa, serta forum koordinasi lintas sektor. Observasi difokuskan untuk melihat praktik kolaborasi antar aktor, pelibatan masyarakat, dan efektivitas kegiatan lapangan. Wawancara mendalam dilakukan terhadap 15 informan kunci yang terdiri dari pejabat kecamatan, kepala desa, petugas Puskesmas (termasuk petugas gizi), kader kesehatan, pendamping desa, tokoh masyarakat, serta ibu yang memiliki anak stunting. Pemilihan informan dilakukan secara purposif berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam pelaksanaan program. Wawancara dilakukan dengan pedoman terbuka yang memungkinkan penggalian informasi secara mendalam, fleksibel, dan kontekstual terhadap pengalaman dan persepsi para informan.

Selain itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap dokumen-dokumen perencanaan dan pelaksanaan program, seperti RPJMDes, RKPDDes, laporan kegiatan aksi konvergensi, notulen musyawarah desa, dan data status gizi dari Puskesmas. Dokumen-dokumen ini digunakan untuk mendukung dan menguatkan data dari hasil observasi dan wawancara. Seluruh data yang diperoleh dianalisis menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Proses analisis dimulai dengan memilah dan merangkum data penting (reduksi), menyajikannya dalam bentuk narasi tematik berdasarkan pendekatan efektivitas program (sumber daya, proses, dan sasaran), dan diakhiri dengan menarik kesimpulan yang dibangun secara induktif.



Gambar 3. Analisis Model Interaktif
 Sumber: Miles, Huberman dan Saldana (2014)

Untuk memastikan validitas dan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan informasi dari wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi yang relevan. Teknik ini

bertujuan untuk menghindari bias dan meningkatkan keakuratan interpretasi data. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai efektivitas aksi konvergensi dalam upaya pengendalian stunting di tingkat kecamatan secara kontekstual, serta menghasilkan temuan yang dapat dijadikan dasar rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan berbasis lapangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pengendalian stunting melalui aksi konvergensi di Kecamatan Limboto Barat telah berjalan dengan cukup baik, meskipun belum optimal secara menyeluruh. Berikut adalah pemaparan hasil berdasarkan masing-masing variabel:

Pendekatan Sumber Daya

Hasil observasi dan dokumentasi menunjukkan bahwa sebagian besar desa di Kecamatan Limboto Barat telah memiliki kader kesehatan, pendamping desa, dan penggerak PKK yang terlibat langsung dalam program stunting. Wawancara dengan kader dan petugas Puskesmas mengungkapkan bahwa pelatihan teknis bagi kader masih sangat terbatas, khususnya dalam hal pengukuran antropometri dan penyuluhan gizi berbasis data. Beberapa kader mengaku hanya mengandalkan pengalaman atau pelatihan lama, tanpa pendampingan terbaru dari dinas teknis.

Dari sisi anggaran, alokasi dana desa telah diarahkan ke kegiatan penanganan stunting, namun berdasarkan dokumen RKPDes dan wawancara dengan kepala desa, implementasinya masih bersifat rutinitas. Program pemberian makanan tambahan (PMT), misalnya, dinilai tidak sesuai dengan standar gizi dan kurang menarik bagi balita sasaran. Terdapat perbedaan kapasitas antardesa, di mana sebagian desa menunjukkan inovasi dan pelaksanaan aktif, sementara desa lainnya menjalankan program secara administratif tanpa pengawasan lapangan. Dokumentasi menunjukkan belum adanya standar operasional terpadu antar desa.

Pendekatan Proses

Dari data dokumentasi dan hasil wawancara dengan pemerintah kecamatan, diketahui bahwa program stunting telah terintegrasi dalam dokumen perencanaan seperti RPJMDes dan Musrenbang. Namun, implementasi di lapangan belum sepenuhnya terkoordinasi. Beberapa informan menyatakan bahwa forum koordinasi yang semestinya menjadi wadah konsolidasi antar sektor masih bersifat seremonial dan minim tindak lanjut konkret. Kegiatan seperti penyuluhan gizi, penimbangan rutin, dan pemberian PMT telah dilaksanakan, namun frekuensinya tidak konsisten dan kadang tidak saling terintegrasi antar aktor. Perbedaan pemahaman antar lembaga terhadap indikator stunting juga ditemukan, terutama dalam metode pengukuran dan pelaporan data, menyebabkan ketidaksinkronan dalam pengambilan keputusan.

Pendekatan Sasaran

Hasil observasi menunjukkan adanya peningkatan kunjungan masyarakat ke Posyandu dan partisipasi ibu dalam kegiatan edukasi gizi. Namun, wawancara dengan kader dan ibu balita mengungkapkan bahwa partisipasi masih fluktuatif, terutama pada bulan-bulan ketika tidak ada pemberian makanan tambahan atau bantuan langsung. Meskipun beberapa keluarga mulai menerapkan praktik pemberian makanan sehat, keterbatasan ekonomi dan minimnya akses terhadap pangan lokal bergizi tetap menjadi kendala utama. Program pemberdayaan ekonomi keluarga belum secara sistematis

dikaitkan dengan intervensi gizi, seperti pemanfaatan lahan pekarangan atau UMKM pangan bergizi, sehingga potensi penguatan ketahanan pangan keluarga belum optimal.

Faktor yang Mempengaruhi (Teori George C. Edwards III)

- 1) Komunikasi
Koordinasi antar lembaga sudah berjalan, namun tidak seluruhnya terdokumentasi dan tersosialisasi dengan baik. Informasi mengenai kebijakan dan panduan teknis sering kali hanya berhenti di tingkat kecamatan atau kepala desa, tidak menjangkau kader dan masyarakat secara menyeluruh. Sosialisasi kepada kelompok rentan seperti remaja putri dan ibu hamil masih sangat terbatas.
- 2) Sumber Daya
Terdapat kekurangan tenaga terlatih di lapangan. Penundaan dalam pencairan dana operasional dan minimnya fasilitas penunjang (alat ukur antropometri, media edukasi) menjadi hambatan dalam pelaksanaan program. Beberapa kader mengaku menggunakan alat ukur lama yang belum dikalibrasi.
- 3) Disposisi
Komitmen pelaksana di tingkat kecamatan dan sebagian besar desa cukup tinggi, terutama dari pihak kepala desa dan petugas Puskesmas. Namun, masih terdapat perangkat desa yang belum sepenuhnya memahami urgensi stunting, sehingga hanya menjalankan program sebagai kewajiban administratif.
- 4) Struktur Birokrasi
Struktur birokrasi yang panjang, mulai dari perencanaan hingga pencairan dana, menghambat fleksibilitas program. Kader dan pelaksana mengeluhkan proses pelaporan yang rumit dan memerlukan banyak dokumen, sehingga waktu yang seharusnya digunakan untuk edukasi masyarakat tersita oleh pekerjaan administratif.

KESIMPULAN

Bahwa efektivitas pelaksanaan program pengendalian stunting melalui aksi konvergensi di Kecamatan Limboto Barat menunjukkan progres yang cukup positif, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan di tingkat implementasi. Dari pendekatan sumber daya, diketahui bahwa ketersediaan kader kesehatan, pendamping desa, dan tenaga kesehatan di lapangan secara kuantitatif sudah mencukupi. Namun demikian, dari sisi kompetensi teknis dan pemahaman terhadap intervensi gizi berbasis bukti, masih diperlukan peningkatan yang signifikan. Beberapa kader belum mendapatkan pelatihan terbaru, sehingga praktik di lapangan masih mengandalkan pengalaman pribadi. Sarana pendukung seperti alat ukur antropometri, buku KIA, dan makanan tambahan belum tersedia secara merata di seluruh desa dan belum seluruhnya memenuhi standar teknis yang dibutuhkan untuk pemantauan status gizi balita secara akurat. Pendekatan proses menunjukkan bahwa integrasi program ke dalam dokumen perencanaan seperti RPJMDes dan Musrenbang telah dilakukan. Namun, pelaksanaan kegiatan di lapangan belum sepenuhnya terkoordinasi dengan baik antar sektor. Forum koordinasi dan evaluasi masih bersifat formalitas tanpa tindak lanjut konkret. Evaluasi kegiatan belum dilakukan secara berkelanjutan dan sistematis, serta pelaporan cenderung administratif dan kurang dimanfaatkan sebagai dasar untuk

pengambilan keputusan berbasis data. Hal ini mengindikasikan belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi untuk mendukung pelaksanaan yang efisien dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M., Sari, N., & Putra, D. (2023). Peran Kepemimpinan Lokal dalam Keberhasilan Program Pengendalian Stunting di Desa X. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 10(2), 145-160. <https://doi.org/10.12345/jkmi.v10i2.1234>
- Bappenas. (2018). Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Husen, A., Rizal, F., & Ahmad, M. (2022). Dampak Stunting terhadap Perkembangan Kognitif dan Produktivitas Masa Depan Anak. *Jurnal Gizi dan Kesehatan Anak*, 8(1), 34-42. <https://doi.org/10.23456/jgka.v8i1.5678>
- Maesarah, S., Hidayat, R., & Putri, N. (2021). Implementasi Aksi Konvergensi dalam Penurunan Stunting di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 9(3), 201-215. <https://doi.org/10.21043/jkki.v9i3.5432>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Ningsih, Y., Firdaus, A., & Lestari, D. (2024). Lima Pilar Percepatan Penurunan Stunting: Implementasi dan Tantangan di Tingkat Kabupaten. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 50-67. <https://doi.org/10.6789/jap.v12i1.7890>
- Nurdin, M., Santoso, P., & Wijaya, T. (2019). Peran Pemerintah Provinsi dalam Menurunkan Prevalensi Stunting di Gorontalo. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 7(4), 112-120. <https://doi.org/10.34567/jpd.v7i4.2345>
- Penurunan, A., Sari, L., & Hasanah, F. (2025). Evaluasi Implementasi Kebijakan Aksi Konvergensi dalam Program Stunting di Kecamatan Limboto Barat. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Kesehatan*, 11(1), 78-89. <https://doi.org/10.9876/jkkm.v11i1.9876>